

ANALISA PENGGUNAAN DAN PENYALURAN PUPUK DI KALIMANTAN BARAT

I Wayan Rusastra*) dan Effendi Pasandaran*)

Abstrak

Kajian ini menggunakan data sekunder yang diperkaya dengan informasi kualitatif melalui wawancara untuk menganalisa penggunaan dan penyaluran pupuk di Wilayah Pemasaran Kalimantan Barat. Didapatkan bahwa pengalihan program Bimas ke Inmas mengakibatkan menurunnya secara tajam penggunaan berbagai jenis pupuk Sub Sektor Tanaman Pangan. Penyebabnya antara lain adalah besarnya kendala teknis budidaya, keadaan agroekologi yang kurang menguntungkan perkembangan tanaman pangan dan masih lemahnya persepsi petani tentang penggunaan berbagai jenis pupuk, khususnya TSP. Konsumsi pupuk Sub Sektor Perkebunan dalam jangka pendek akan dapat ditingkatkan dengan memperluas areal Perkebunan Besar Negara, berbagai proyek pengembangan komoditi perkebunan dan memantapkan pembinaan pemasaran komoditi swadaya seperti cengkeh, lada dan jeruk. Bidang usaha penyaluran pupuk yang kurang menarik di daerah ini dapat dirangsang diantaranya dengan meningkatkan margin penyaluran dan mengalihkan penjualan langsung oleh KPW Pusri kepada penyalur. Pemecahan kendala penyaluran pupuk dari Lini IV ke petani secara koordinatif diyakinkan akan dapat memperlancar penyaluran pupuk secara keseluruhan di daerah ini.

PENDAHULUAN

Guna menangkap secara utuh keragaan dan permasalahan penggunaan dan penyaluran pupuk di Indonesia diantaranya perlu diperhitungkan keragaman keadaan wilayah di tanah air. Keragaman tersebut dapat menyangkut aspek perkembangan pembangunan pertanian, kelengkapan prasarana fisik yang menunjang kemudahan penyaluran dan penggunaan pupuk, potensi pengembangan komoditi dimasa depan dilihat dari segi konsolidasi lahan dan permasalahan sosial budaya masyarakatnya.

Kalimantan Barat dalam peta perpupukan nasional termasuk Wilayah Pemasaran D, dimana sampai saat ini merupakan konsumen pupuk baik Urea, TSP apalagi ZA relatif sangat rendah. Konsumsi yang rendah diperkirakan karena kuantitas dan kualitas intensifikasi yang rendah, khususnya

tanaman pangan. Wilayah ini termasuk dalam Bimas Kelompok B.

Dilihat dari segi kelengkapan prasarana dan sarana penunjang pembangunan keadaannya kurang memadai. Keadaan jalan dan sarana angkutan yang belum mencukupi jumlah dan kualitasnya merupakan ciri umum daerah yang baru dikembangkan. Prasarana irigasi relatif baru diperkenalkan yang sudah tentu diikuti oleh persoalan teknis dan sosial yang tidak mudah dipecahkan. Ditambah lagi permasalahan menghadapi sikap mental sebagian petani yang juga relatif baru mengenal berbagai jenis teknologi maju di bidang pertanian. Semua permasalahan ini akan memberikan warna tersendiri dalam penggunaan dan penyaluran pupuk di daerah ini.

Bila faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dan penyaluran pupuk di daerah ini dapat dirumuskan dengan baik, diharapkan penanganan masalahnya bagi produsen dan penyalur dapat lebih terencana. Hasil kajian ini tentunya diharapkan menjadi semacam prototipe guna meropong permasalahan di daerah dengan keragaan

*) Staf peneliti pada Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

yang serupa. Di samping itu memberi **kelengkapan** permasalahan penyaluran dan **penggunaan** pupuk di tanah air.

METODOLOGI PENELITIAN

Penggunaan pupuk **diantaranya** terkait dengan aspek **agro-ekologi**, **perkembangan** program pembangunan pertanian dan komoditi pada suatu daerah. **Aspek agro-ekologi** diharapkan dapat menjadi **semacam norma tepat-tidaknya** alokasi jenis pupuk di **suatu wilayah** dan sebagai dasar untuk **menentukan arah** perkembangan jenis pupuk **dimasa datang**. Data yang digunakan adalah data **sekunder tentang** perkembangan program dan komoditi **selama lima tahun terakhir** di tingkat propinsi yang **selanjutnya** dikaitkan dengan konsumsi dan penggunaan berbagai jenis pupuk.

Data kuantitatif lainnya yang dibutuhkan adalah data untuk **mengungkap keragaan** penyaluran seperti **pengudangan, transaksi pembelian, angkutan, volume yang ditangani, masalah stock dan masalah yang berkaitan dengan jenis pupuk**. Secara tersirat di dalamnya akan menyangkut partisipasi modal penyalur, resiko dan margin tata-niaga, masalah prasarana jalan dan angkutan dan kelancaran transaksi keuangan. Semua data ini akan diperoleh di Kantor Pemasaran Wilayah Pusri di tingkat propinsi dan aparaturnya di tingkat kabupaten.

Selain pengumpulan data kuantitatif tentang penggunaan dan penyaluran pupuk, juga diperoleh informasi melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Pekerjaan Umum dan Kantor Pemasaran Wilayah Pusri di tingkat propinsi dan kabupaten (kabupaten Sambas dan Pontianak). Pendekatan yang digunakan dalam menangkap informasi kualitatif adalah dengan menggunakan kerangka logika sebagai berikut: (a) keragaan; (b) kausalitas/persepsi; (c) pola repons stimulasi; (d) status quo kini dan prospek; (e) diagnostik; dan (f) terapi. Butir (a) sampai dengan (c) lebih mencerminkan sikap "empati obyektif" sedangkan (d) dan (e) lebih mencerminkan sikap "empati subyektif" (Nata-atmadja, 1984). Dikatakan pula bahwa terapi selalu merupakan sintesis antara empati obyektif dengan subyektif.

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN PUPUK DAN KEADAAN AGRO EKOLOGI

Perkembangan Program dan Penggunaan Pupuk

Program pembangunan pertanian sangat menentukan besar-kecilnya penggunaan pupuk di Kalimantan Barat. Dalam intensifikasi tanaman pangan, program pengembangan komoditi padi memiliki peranan dominan dan permasalahan yang cukup besar pula. Secara absolut perkembangan penggunaan berbagai jenis pupuk program intensifikasi padi cukup menggembirakan (Tabel 1). Walaupun demikian realisasi penggunaan relatif terhadap sasaran memiliki persentase yang cukup rendah. Demikian juga perkembangannya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan perkembangan realisasi penggunaan sarana produksi bersangkutan. Gambaran ini menunjukkan kurang berhasilnya program intensifikasi padi di daerah ini. Terbukti dari tidak tercapainya sasaran secara kuantum dari tahun ke tahun.

Menarik untuk dikemukakan adalah perkembangan realisasi penggunaan TSP yang cukup besar dan melebihi Urea (108,85%/tahun vs. 82,01% per tahun). Namun demikian perkembangan tersebut tidak mencerminkan makna yang mendalam dari penggunaan jenis pupuk TSP. Secara relatif realisasi penggunaan terhadap sasaran sangat rendah (28,95% vs. 41,83%), dengan perkembangan yang tidak jauh berbeda, 22,04%/tahun untuk TSP dan 19,96%/tahun untuk Urea (Tabel 1). Bila kita berasumsi bahwa rencana penggunaan kedua jenis pupuk ini merupakan refleksi dari paket anjuran antara keduanya, maka gambaran di atas tidak menggembirakan dilihat dari penggunaan pemupukan berimbang.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penggunaan Berbagai Jenis Pupuk Program Intensifikasi Padi dalam Pelita III di Kalimantan Barat, 1979-1982.

Uraian	Rata-rata	Perkembangan (persen/tahun)
1. Pupuk Urea (ton)	4.197	82,01
Pupuk Urea vs Sasaran (%)	41,83	19,96
2. Pupuk TSP (ton)	1.796	108,85
Pupuk TSP vs Sasaran (%)	28,95	22,04
3. Pupuk KCl/DAP (ton)	47,59	79,93

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi DT. I Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Program Intensifikasi Padi di Kalimantan Barat dalam Pelita III, 1979-1982.

Program	Rata-rata program (Ha/Tahun)		Persentase Realisasi (%)	Perkembangan Realisasi (Persen/Tahun)
	Rencana	Realisasi		
Bimas Padi				
Sawah	47.737	15.237	31,92	70,69
Inmas Padi				
Sawah	24.125	40.544	168,06	15,39
Bimas Padi				
Pasang Surut	73.800	4.561	6,18	-24,95
Inmas Padi				
Pasang Surut	25.500	20.967	78,69	-23,47

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi DT. I Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

Keragaan penggunaan pupuk yang kurang menggembarakan di atas erat kaitannya dengan pencapaian areal intensifikasi. Persentase realisasi areal Bimas padi sawah dan padi pasang surut adalah sangat rendah, masing-masing 31,92 persen dan 6,18 persen (Tabel 2). Terlihat pula bahwa perkembangan padi pasang surut mengalami penurunan 24,95% per tahun dalam kurun waktu Pelita III (1978/79 - 1982/83). Persentase realisasi Inmas padi sawah yang cukup meyakinkan (168,06 persen) dengan perkembangan 15,39 persen/tahun ternyata tidak memberi sumbangan terhadap konsumsi pupuk program intensifikasi padi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pupuk per hektar untuk jenis intensifikasi ini masih rendah. Berbeda halnya dengan program Bimas yang sudah merupakan suatu paket tertentu sesuai dengan rekomendasi.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penggunaan pupuk program intensifikasi padi adalah realisasi penggunaan sarana produksi per hektar. Terlihat bahwa realisasi dosis Urea maupun TSP cukup rendah yaitu 27,83 persen untuk Urea dan 27,48 persen untuk TSP (Tabel 3). Perkembangan persentase realisasi dosis terhadap rekomendasi untuk Urea dan TSP didapatkan lebih rendah dari perkembangan realisasi secara absolut. Keadaan ini menunjukkan adanya suatu kesenjangan di dalam pencapaian dosis rekomendasi di masa mendatang.

Unsur penting lainnya yang memegang peranan dalam penyerapan pupuk adalah pengembangan program prasarana irigasi. Di Kalimantan Barat hanya terdapat 379 ha sawah berpengairan teknis yang dapat ditanami dua kali

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Penggunaan Pupuk per Ha Program Intensifikasi Padi dalam Pelita III di Kalimantan Barat, 1979-1983.

Uraian	Rata-rata	Perkembangan (persen/tahun)
1. Pupuk Urea (kg/ha)	52,78	48,05
Urea vs Rekomendasi (%)	27,83	40,39
2. Pupuk TSP (kg/ha)	26,41	62,14
TSP vs Rekomendasi (%)	27,48	55,82
3. Pupuk KCl/DAP (kg/ha)	6,03	94,86

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi DT. I Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

dalam setahun. Jumlah itu sangat minimal, yaitu 0,17% dari total lahan sawah, atau 0,65% dari lahan beririgasi di daerah ini (Tabel 4). Bila saja

Tabel 4. Luas Tanah Sawah Diperinci Menurut Jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi di Kalimantan Barat, 1982.

Jenis Pengairan	Frekuensi Penanaman dalam Setahun		
	Satu kali	Dua kali	Jumlah
	-----Ha-----		
Pengairan Teknis	—	379	379
Pengairan ½ teknis	2.681	1.959	4.820
Pengairan Sederhana PU	9.740	3.575	13.315
Pengairan Non PU	37.476	2.641	40.090
Tadah Hujan	90.225	22.406	112.681
Pasang Surut	19.416	6.392	25.808
Lainnya	24.222	1.647	25.912
T o t a l	183.940	38.972	222.912

Sumber: Statistik Agraria, Kantor Statistik Propinsi DT. I Kalimantan Barat, Pontianak.

seluruh lahan yang selama ini memiliki potensi untuk dikembangkan pengairannya yang luasnya 58.604 ha dikembangkan menjadi berpengairan teknis tentu akan sangat membantu pemanfaatan teknologi pertanian menjadi lebih baik. Dapat dikemukakan bahwa lahan sawah yang dikembangkan untuk budidaya tanaman pangan (padi) di Kalimantan Barat umumnya adalah lahan marginal, dimana 50,53% adalah lahan tadah hujan yang sangat tergantung pada iklim.

Perkembangan Komoditi dan Penggunaan Pupuk

Peranan relatif penyerapan pupuk berbagai sektor di Kalimantan Barat didapatkan pada Tabel 5. Terlihat jelas bahwa peranan program Bimas/Opsus dalam pengembangan tanaman pangan cukup penting. Program Bimas/Opsus digalakkan pada tahun 1982, dengan implikasi peranan dari program ini cukup besar. Karena adanya tunggakan kredit Bimas padi, program tersebut tidak bisa berlangsung sehingga peranan Bimas/Opsus jatuh pada tahun berikutnya.

Pengembangan komoditi tanaman pangan di daerah transmigrasi (P3DT) dan pangan non Bimas (Inmas) peranannya secara absolut cukup stabil. Karena adanya penurunan peranan Bimas khususnya untuk komoditi padi pada tahun 1983, maka secara relatif peranan P3DT meningkat. Peranan perkebunan pada tahun 1983 baik secara relatif maupun absolut meningkat cukup tajam. Demikian juga dengan permintaan terhadap Urea dari sektor industri kayu lapis (Tabel 5).

Pada Tabel 6 disajikan perkembangan areal dan produksi perkebunan rakyat di Kalimantan Barat. Terlihat luas areal karet dan kelapa cukup dominan, sekalipun perkembangannya tidak

begitu menggembirakan. Tanaman kopi cukup berkembang, namun komoditi ini seperti halnya karet dan kelapa, juga tidak berperan dalam penyerapan pupuk. Komoditi perkebunan swadaya harapan yang muncul sebagai akibat adanya tarikan pasar adalah cengkeh dan lada. Perkembangan areal dan produksi komoditi ini cukup menggembirakan. Selain itu komoditi tebu seperti halnya cengkeh dan lada juga memberi sumbang-an yang berarti dalam penyerapan pupuk.

Berbeda halnya dengan komoditi jeruk, perluasan komoditi lada dan cengkeh ditinjau dari pemanfaatan lahan tidak akan bersaing dengan tanaman pangan. Komoditi ini, khususnya lada memerlukan perawatan yang intensif, sehingga petani lada umumnya bersifat terspesialisasi. Petani yang mengusahakannya adalah petani maju dan persepsinya tentang pemupukan sudah mantap.

Tabel 6. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kalimantan Barat, 1979-1983.

Komoditi	Luas Areal		Produksi	
	Rata-rata (ha)	Trend (%/th.)	Rata-rata (ha)	Trend (%/th.)
1. Karet	311.879	1,54	106.279	1,16
2. Kelapa	90.994	-5,18	53.307	-4,10
3. Kopi	5.723	17,49	1.632	11,40
4. Cengkeh	2.255	10,95	18	29,44
5. Lada	1.618	10,38	850	4,94
6. Tebu	1.366	5,12	3.028	2,12

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi DT. I Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

Perkebunan besar negara dan proyek pengembangan komoditi perkebunan, selama ini merupakan potensi terbesar penggunaan pupuk

Tabel 5. Peranan Relatif Penyerapan Pupuk Berbagai Sektor di Kalimantan Barat, 1981 - 1983.

Sektor	TSP			Urea		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
	----- % -----			----- % -----		
1. Bimas/Opsus	33,11	79,85	12,43	38,03	71,45	8,39
2. P3DT	19,39	16,25	39,62	10,03	11,50	11,60
3. Non Bimas	19,89	11,43	7,82	36,92	11,10	12,17
4. Perkebunan	27,61	0,47	40,13	15,04	5,32	17,16
5. Industri	—	—	—	—	0,63	50,68
Total Fisik (ton)	3.002	8.168	4.207	5.864	16.114	15.097

Sumber: Kantor pemasaran Wilayah PT. Pupuk Sriwijaya Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

sub sektor perkebunan. Realisasi berbagai proyek komoditi perkebunan dalam Pelita III dan sasaran pengembangannya dalam Pelita IV didapatkan pada Tabel 7. Pengembangan PIR kelapa sawit dalam Pelita IV yang sangat besar memberi harapan penyerapan berbagai jenis pupuk di daerah ini.

Tabel 7. Realisasi Pembangunan Perkebunan Pelita III dan Sasaran Pengembangan Pelita IV, di Kalimantan Barat.

Budidaya ¹⁾	Realisasi Pelita III	Sasaran Pelita IV
-----Ha-----		
1. Pola PRPTE		
Karet	5.263	18.600
Kelapa	9.482	14.000
Cokelat	381	1.650
Lada	257	2.252
Kopi	1.302	—
2. Pola UPP		
Karet/SRDP	10.885	4.117
3. Pola PIR		
— Kelapa Sawit		
Kebun Inti	2.500	25.900
Kebun Plasma	4.800	96.630
— Karet		
Kebun Inti	2.205	5.730
Kebun Plasma	10.583	12.857

Keterangan: ¹⁾ Pola swadaya cengkeh dan tebu dalam Pelita IV ditargetkan masing-masing 1300 ha dan 5000 ha.

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi DT. I Kalimantan Barat, Pontianak.

Disamping itu budidaya perkebunan rakyat merupakan potensi yang sangat besar dalam penggunaan pupuk, sekiranya kendala sosial dan ekonomik pengembangannya dapat diatasi.

KERAGAAN DAN PERMASALAHAN PENYALURAN PUPUK

Peranan Penyalur dan Pembeli

Pada tahun 1982 dan sebelumnya peranan penyalur terlihat cukup besar. Setelah tahun 1982 peranan penyalur yang umumnya melayani kebutuhan petani menurun secara tajam. Hal ini disebabkan oleh dihapuskannya program Bimas, sedangkan daya beli dan persepsi petani tentang penggunaan pupuk umumnya masih kurang. Di lain pihak peranan pembeli langsung kepada KPW Pusri (PTP XII, XIII, PT. Kurnia Kapuas dan lain-lainnya) selama dua tahun terakhir menempati posisi yang dominan (Tabel 8). PT. Kurnia Kapuas merupakan pembeli terbesar, dimana jenis pupuk yang dibutuhkan adalah Urea sebagai bahan masukan untuk industri kayu lapis. Diduga pada tahun mendatang permintaan dari sektor industri ini akan menurun, karena adanya pembatasan quota ekspor.

Perkembangan penggunaan Urea dan TSP yang umumnya dialokasikan untuk sub-sektor tanaman pangan yang didistribusikan oleh penyalur masing-masing mengalami penurunan sekitar lima persen (Tabel 9). Dilain pihak perkembangan

Tabel 8. Peranan Penyalur dan Pembeli Dibandingkan dengan Volume Total Penjualan di Kalimantan Barat, 1981-1984.

Uraian	Peranan (Persen)			
	1981	1982	1983	1984
Penyalur:	80,38	95,91	39,42	42,31
— PT. Kertaniaga	49,15	19,33	6,31	19,25
— PT. Pertani	10,48	28,57	24,70	15,72
— Puskud Kalbar	—	12,72	6,50	5,41
— PT. Hastafarma	20,75	35,29	1,91	1,93
Pembeli:	19,62	4,09	60,58	57,69
— PT. Perkebunan XII	—	3,28	15,21	—
— PT. Perkebunan XIII	14,23	—	8,85	6,63
— PT. Kurnia Kapuas	—	0,41	36,50	45,87
— Lain-lain	5,39	0,40	0,02	5,19
Fisik Penyaluran (ton)	9.135	24.682	20.969	32.701

Sumber: Laporan Tahunan KPW Pusri Kalimantan Barat, 1985. Pontianak (Diolah).

Tabel 9. Perkembangan Penyaluran Berbagai Jenis Pupuk Menurut Penyalur dan Pembeli di Kalimantan Barat, 1981-1984.

Uraian	Rata-rata ³⁾ (ton)	Trend (%/Tahun)	Korelasi
Penyalur:¹⁾			
— Urea	7.339 (59,70)	-5,12	-0,12
— TSP	4.052 (32,96)	-5,07	-0,10
— KCl	902 (7,34)	+69,82	+0,87
Total	12.293 (100,00)	+0,40	+0,01
Pembeli:²⁾			
— Urea	7.295 (84,93)	+79,27	+0,95
— TSP	795 (9,26)	+14,10	+0,22
— KCl	499 (5,81)	-2,71	-1,83
Total	8.589 (100,00)	+67,05	+0,83

Keterangan: ¹⁾ PT. Kerta Niaga, PT. Pertani, Puskud Kalbar dan PT. Hastafarma.

²⁾ PTP. XII, PTP. XIII, PT. Kurnia Kapuas dan lain-lain.

³⁾ Angka dalam kurung adalah persentase penyaluran Urea, TSP dan KCl masing-masing terhadap total penyaluran penyalur dan pembeli.

Sumber: Kantor Pemasaran KPW Pusri Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

penggunaan Urea dan TSP untuk PT. Perkebunan dan industri mengalami peningkatan yang cukup besar, masing-masing 79,27% dan 14,10%/tahun. Kecenderungan ini dapat membuat persoalan tersendiri bagi PT. Pusri sebagai produsen Urea, bila penggunaan untuk industri dengan tiba-tiba menurun secara tajam. Tapi keadaan ini nampaknya mudah dikompensasi karena besarnya proporsi penjualan Urea dengan kisaran 50-85 persen.

Sistem Pembayaran dan Mutasi Stock Pupuk

Pada umumnya sistem pembayaran dalam pembelian pupuk oleh penyalur dilakukan secara kredit dan tunai. Pada tahun 1982 sistem pembayaran secara kredit didapatkan lebih besar, sedangkan pada tahun berikutnya sistem pembayaran kredit menurun dan diikuti oleh peningkatan pembayaran tunai (Tabel 10). Dilain pihak pembeli membayar secara tunai semua jenis pupuk yang dibutuhkan. Besarnya pembayaran dengan sistem kredit pada tahun 1982 diduga terkait dengan penggalakan program Bimas dan Opsus pada waktu tersebut.

Prasarana yang memegang peranan penting dalam penyaluran pupuk adalah gudang. Di Kalimantan Barat persyaratan sebagai penyalur yang

Tabel 10. Realisasi Sistem Pembayaran dalam Penjualan Pupuk (Urea, TSP dan KCl) di Kalimantan Barat, 1981-1983.

Uraian	Tahun penjualan		
	1981	1982	1983
Penyalur:¹⁾			
— Kredit	48,13	82,44	59,23
— Tunai	51,87	17,56	40,77
Total (ton)	7.344	23.678	8.270
Pembeli:¹⁾			
— Kredit	—	—	—
— Tunai	100,00	100,00	100,00
Total (ton)	1.791	1.004	12.699

Keterangan: ¹⁾ Keterangan Penyalur dan Pembeli, perhatian catatan pada Tabel 9.

Sumber: Kantor Pemasaran Wilayah Pusri Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

harus memiliki gudang di lini III ternyata tidak dapat dipenuhi. Penyebabnya adalah volume penyaluran yang masih rendah. Semua gudang di Lini III yang ada di Pontianak, Singkawang dan Sintete berada di bawah penguasaan KPW Pusri Kalimantan Barat, baik gudang milik maupun gudang sewa.

Tabel 11. Mutasi Stock Fisik Pupuk per Gudang Menurut Lini dan Status Penguasaan Gudang, Tahun 1983.

Uraian ¹⁾	Kapasitas	Penge- luaran	Sisa stock Des. 1983	Turn over ²⁾
1. Gudang Lini II:	2.630	3.854	1.993	2,22
— Milik	3.000	13.522	2.093	5,20
— Sewa	2.538	1.437	1.968	1,34
2. Gudang Lini III:	1.540	1.739	1.482	2,09
— Milik	3.000	2.574	4.095	2,22
— Sewa	1.175	1.530	828	2,01
3. Gudang Lini II + III:	2.085	2.282	1.737	1,93
— Milik	3.000	8.048	3.094	3,71
— Sewa	1.856	1.483	1.398	1,55

Keterangan:

¹⁾ Lini I adalah produsen Pupuk (PT. Pusri), gudang Lini II terletak di tingkat Propinsi dikuasai oleh KPW Pusri, gudang Lini III terletak di tingkat Kabupaten yang seharusnya dikuasai oleh penyalur dan gudang Lini IV terletak di tingkat desa yang dikuasai oleh pengecer swasta atau KUD.

²⁾ Turn over adalah pengeluaran pupuk + stock akhir tahun dibagi kapasitas gudang.

Sumber: Kantor Pemasaran Wilayah Pusri Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

Kalau diperhatikan penyaluran dari gudang yang dikuasai Pusri selama ini tampak bahwa mutasi pupuknya cukup rendah. *Turn overnya* tidak melebihi angka 5,00, kecuali gudang milik di Lini II yang *Turn overnya* 5,20 (Tabel 11). Keadaan ini menunjukkan bahwa penguasaan gudang di daerah yang sudah dianggap potensial (kabupaten Pontianak dan Sambas) penyaluran pupuknya ternyata juga tidak efisien. Terdapat semacam norma bahwa *turn over* penguasaan suatu gudang minimal harus mencapai 7,00.

Margin Pemasaran

Bagi penyalur di Lini III margin yang diperoleh sebesar Rp 2.080/ton dinilai sangat rendah. Kalau penyaluran pupuk dari pelabuhan ke Lini II dan dari Lini II ke Lini III ditangani oleh KPW Pusri lewat tender, maka penyaluran pupuk ke Lini IV ditangani oleh penyalur sendiri berdasarkan ongkos angkut yang ditetapkan dalam SK. Bupati. Subsidi ongkos angkut Lini III ke Lini IV dalam SK. Menteri Keuangan jauh lebih rendah dari kenyataan dalam SK. Bupati setempat (Tabel 12).

Penyalur bersama dengan ekspediturnya harus menanggulangi terlebih dahulu tambahan biaya angkut agar pupuk tersalurkan sampai ke Lini IV. Tidak jarang karena keterlambatan

Tabel 12. Penetapan Tarif Khusus Angkutan Pupuk dan Pestisida dari Lini III ke Lini IV di Kalimantan Barat.

Kabupaten	Tarif Angkutan (Rp/kg)		SK. Bupati
	Range	Rata-rata	
1. Sanggau:			
Non Transmigrasi	6,00 - 37,75	22,57	No.39/1983
Transmigrasi	12,24 - 33,48	23,88	No.39/1983
2. Sambas:			
Non Transmigrasi	5,20 - 37,00	15,67	No.23/1983
3. Pontianak:			
Non Transmigrasi	5,00 - 30,00	19,78	No.93/1982
4. Sintang:			
Non Transmigrasi	20,00 - 85,00	69,70	No.19/1983
Transmigrasi	31,20 - 42,45	35,94	No.19/1983

Sumber: Kantor Pemasaran Wilayah Pusri Kalimantan Barat, Pontianak (Diolah).

penyerahan dokumen, penggantian tambahan ongkos angkut ini harus menunggu lebih lama, karena harus mendapat persetujuan kantor Pusri di Palembang. Secara relatif modal yang dibutuhkan penyalur di daerah ini akan lebih besar dari

pada Wilayah Pemasaran A, B dan C, yang memperoleh margin yang sama. Bagi penyalur seperti Puskud dan Persero lainnya (kecuali PERTANI) cukup menjadi masalah karena kerugian merupakan tanggung jawab sendiri, tidak dapat ditutupi dengan keuntungan penyalur yang sama di wilayah pemasaran lainnya.

Kendala Penyaluran Pupuk

Kendala utama penyaluran pupuk di Kalimantan Barat adalah masalah penyaluran dari Lini IV ke petani. Hal ini direfleksikan oleh harga pupuk yang melebihi ketetapan yang berlaku dan keterlambatan waktu penerimaan di tingkat petani.

Terjadinya harga pupuk di atas ketentuan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) wilayah KUD umumnya luas dengan radius sekitar 42 km dengan medan yang berat sehingga perlu biaya ekstra, (2) tonase permintaan umumnya kecil, sehingga untuk menutupi biaya, harga dinaikkan, (3) dengan beralihnya program Bimas ke Inmas, petani membeli pupuk semampunya (eceran) sehingga perlu biaya timbang, susut dan pengantongan, dan (4) tidak tersedianya stock yang cukup di Lini IV.

Keterlambatan waktu penerimaan di tingkat petani dapat terjadi karena: (1) pengecer baru bergerak kalau ada permintaan dari petani, dan tidak selalu siap dalam permodalan, dan (2) di Kalimantan Barat musim tanam terdapat pada bulan Februari s/d April (gadu) dan Agustus s/d Nopember (rendengan). Untuk dapat memenuhi kebutuhan saprodi di lapangan, waktu kegiatan distribusi cukup singkat. Sering terjadi pupuk telah sampai ke Lini IV tetapi tidak bisa digunakan dan ditanggguhkan untuk musim yang akan datang.

KESIMPULAN

1. Penggunaan pupuk di Kalimantan Barat sangat ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan pertanian. Keragaan intensifikasi yang tidak menggembirakan dan pengalihan program Bimas ke Inmas menyebabkan menurunnya penggunaan pupuk yang sejak semula memang tidak begitu besar. Keadaan ini memberikan petunjuk tentang kurang mantapnya persepsi petani tanaman pangan dalam hal penggunaan berbagai jenis

pupuk. Kendala teknis budidaya dan keadaan agroekologi yang kurang menguntungkan budidaya tanaman pangan nampaknya lebih memperburuk rangsangan dan daya beli petani.

2. Dalam jangka pendek konsumsi pupuk subsektor perkebunan akan dapat ditingkatkan bila dilakukan perluasan Perkebunan Besar Negara dan proyek pengembangan komoditi perkebunan seperti PRPTE, UPP dan PIR. Keterlibatan pemerintah dalam pembinaan pemasaran komoditi swadaya seperti cengkeh, lada dan jeruk perlu lebih dimantapkan untuk menjamin kelangsungan pengembangannya. Ketiga jenis komoditi ini memberi sumbangan yang nyata terhadap konsumsi pupuk di daerah ini. Dalam jangka panjang komoditi tradisional kelapa dan karet yang diusahakan secara meluas oleh masyarakat memiliki potensi penyerapan pupuk yang sangat besar bila kendala teknis, sosial dan ekonomi dalam pengusahaannya dapat diatasi.
3. Menjadi penyalur pupuk di Kalimantan Barat nampaknya bukan suatu bidang usaha yang menarik. Hal ini disebabkan oleh volume permintaan yang rendah dan keuntungan yang diperoleh relatif kecil dibandingkan dengan modal dan resiko yang harus ditanggung oleh penyalur. Kantor Pemasaran Wilayah Pusri perlu mengambil langkah-langkah untuk memberikan insentif dan kemudahan kepada penyalur. Diantaranya yang bisa ditempuh adalah dengan meniadakan penjualan langsung yang belakangan ini semakin mendominasi volume penjualan pupuk. Disamping itu margin penyaluran pupuk perlu ditingkatkan agar proporsional dengan modal yang dikeluarkan oleh penyalur.
4. Kegairahan penyalur, penguasaan dan efisiensi penggunaan gudang secara tidak langsung akan teratasi bila kendala penyaluran pupuk dari Lini IV ke petani dapat dipecahkan. Permasalahan ini perlu mendapatkan penanganan secara koordinatif karena tidak semata-mata menyangkut aspek penyaluran pupuk. Didalamnya tersirat aspek penciptaan teknologi budidaya tanaman, penyuluhan, pelayanan, kelembagaan dan aspek pemasaran komoditi yang dihasilkan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Diperta Pangan, 1984. Evaluasi Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan Pelita III (1979/80 - 1983/84). Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi DT. I Kalimantan Barat, Pontianak.
- Helmi, A., 1984. Kegiatan Alih Teknologi Penyuluhan Pertanian dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk. Pertemuan Teknis Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengujian Pupuk ZA dan TSP, 14-15 Desember 1984, Gresik, Jawa Timur.
- KPW Pusri, 1984. Laporan Tahunan 1983. Kantor Pemasaran Wilayah PT. Pupuk Sriwijaya, Kalimantan Barat, Pontianak.
- KPW Pusri, 1984. Kalimantan Barat dalam Pemasaran Pupuk. Kantor Pemasaran Wilayah PT. Pupuk Sriwijaya, Kalimantan Barat, Pontianak.
- Nataatmadja, H., 1984. Mengatasi Senjang Persepsi antara Petani dengan Aparatur Penunjang dalam Teknologi Pertanian. Pertemuan Teknis Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengujian Pupuk ZA dan TSP, 14-15 Desember 1984, Gresik, Jawa Timur.
- PT. Petro Kimia Gresik, 1983. Rumusan Hasil Pertemuan Teknis Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengujian Pupuk ZA dan TSP (1983). Pertemuan Teknis Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengujian ZA dan TSP, 5-6 Desember 1983, Gresik, Jawa Timur.
- Tim Pupuk Nasional, 1984. Studi Pupuk Nasional II. Departemen Pertanian bekerjasama dengan Departemen Perindustrian, Jakarta.